

KEMISKINAN DI DUNIA KETIGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Anton Agus Setyawan
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

Poverty becomes the main problem, which prevents Third World Countries to be equal as any other countries in the world. This issue could be analysing from the development strategies of the Third World countries. They implemented Western Development strategies, which finally failed to overcome the problem. The main cause of the poverty in the Third World countries is the asymmetry in the world political economy. This article discusses this phenomenon by using three different theories: Centre-Periphery theory, Neo-Marxism and Dependency theory and Classic Marxism theory. The conclusion is, the effects of the asymmetry in the world political economy could be minimize by enforcing the global egalitarianism.

Keywords: *poverty, center-periphery theory, neo-Marxism and dependency theory, global egalitarianism*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang menghantui negara-negara Dunia Ketiga. Realitas ini didasari atas situasi umum yang ada di negara-negara tersebut. Mereka terus berlutut dengan masalah pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan kesejahteraan dan rendahnya tingkat pendapatan. Konsentrasi masyarakat miskin yang berada di negara-negara Dunia Ketiga (Afrika, Asia dan Amerika Latin) senantiasa menjadi perhatian masyarakat dunia. Di ketiga benua tersebut kemiskinan menjadi semacam *lingkaran setan* yang sulit dicari penyelesaiannya. Tanpa menutup kenyataan bahwa di negara-negara maju juga terdapat konsentrasi masyarakat miskin, kemiskinan di Dunia Ketiga telah berkembang sedemikian kompleks sehingga menuntut pemecahan yang komprehensif. Terlepas dari usaha negara-negara maju untuk

membantu penyelesaian masalah kemiskinan di Dunia Ketiga, disengaja atau tidak ekspansi ekonomi-politik negara maju memiliki kontribusi dalam proses terjadinya kemiskinan itu sendiri. Atau, dapat dikatakan terjadi proses pemiskinan global yang menyebabkan semakin memburuknya kondisi masyarakat miskin di negara-negara Dunia Ketiga.

Kemiskinan adalah adanya gap atau jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut secara layak (Bayo Ala, Andre, 1996, h.5). Ada beberapa sebab terjadinya kemiskinan di negara sedang berkembang, salah satunya adalah faktor ketidakberuntungan. Faktor ketidakberuntungan ini merupakan bagian dari pendekatan *integrated poverty* atau kemiskinan terpadu, yang dikemukakan oleh Chambers (Soetrisno, 1997, h.18). Menurut Chambers, ada lima ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin. Kelimanya adalah: kemiskinan (*poverty*), fisik yang lemah (*physical weakness*), kerentanan (*vulnerability*), keterisolasian (*isolation*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*). Lima hal di atas merupakan kondisi riil yang ada pada masyarakat miskin di Dunia Ketiga. Pada kenyataannya situasi tersebut masih diperburuk oleh ketimpangan perekonomian global yang tidak pernah memihak negara-negara Dunia Ketiga.

Dalam menganalisis kemiskinan, ada beberapa teoritis yang menganggap bahwa masyarakat miskin sendirilah penyebab kemiskinan mereka. Analisis ini diungkapkan oleh Pamela Roby yang menyatakan bahwa masyarakat miskin tidak memiliki motivasi dalam mengubah nasib mereka (Weisband, 1989, h.8). Teori ini jelas berlawanan dengan kenyataan di negara-negara berkembang di mana masyarakat miskin bekerja keras untuk mempertahankan hidup mereka. Buruh-buruh tani di Indonesia, pekerja tambang di Amerika Latin ataupun pekerja tekstil di Bangladesh harus bekerja lebih dari 8 jam sehari demi upah yang jauh di bawah kelayakan. Adalah naif, menganggap mereka tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki kualitas hidup.

KONSEP PEMBANGUNAN DI DUNIA KETIGA

Problem kemiskinan di negara-negara berkembang dapat dirunut dari konsep pembangunan mereka. Konsep pembangunan negara-negara tersebut pada umumnya mengadopsi konsep pembangunan negara-negara maju. Konsep-konsep pembangunan tersebut diterapkan

di wilayah Dunia Ketiga yang memiliki kondisi jauh berbeda dan permasalahan lebih kompleks dibanding negara-negara-negara mapan di Eropa dan Amerika Utara. Pengadopsian mentah-mentah ini berlangsung puluhan tahun sehingga terakumulasi menjadi krisis ekonomi di Dunia Ketiga. Sepanjang dekade 70-an hingga 80-an, sebagian negara-negara Asia, Amerika Latin dan Afrika mengalami krisis ekonomi terburuk yang menambah penderitaan rakyatnya. Negara-negara tersebut mengalami ketidakseimbangan eksternal kronis dalam neraca pembayaran mereka, karena ekspor komoditi primer sebagai primadona perdagangan negara-negara tersebut tidak sebanding dengan impor barang-barang produksi bagi rencana besar industrialisasi (Sugiono,1999,h. 151).

Model-model pembangunan dari Barat tersebut akhirnya “digantikan” oleh beberapa model pembangunan non-Barat di luar komunis, yaitu: (1) Model pembangunan autarki (keterlibatan yang relatif kecil dari PMA), dengan contoh Sri Lanka dan Tanzania; (2) Model pembangunan “Wakil” dari proyek besar-besaran demokrasi ala Barat, misalnya di India dan Amerika Latin. (3) Model pembangunan non-Barat yang lebih terbuka terhadap kerjasama dengan Barat, misal: Jepang, Taiwan, Korsel dan negara industri baru lainnya (Damanhuri seperti yang dikutip Hartono,2000,h.81). Dalam perkembangannya, model pembangunan ketiga mengalami kesuksesan pada saat diimplementasikan di beberapa negara Asia. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara melesat jauh meninggalkan kawasan Dunia Ketiga lainnya. Meskipun sempat terkoreksi karena krisis keuangan di kawasan Asia di penghujung 90-an, pertumbuhan ekonomi kawasan ini, kembali pulih memasuki abad 21 ini (ADB,2000,h.1). Hal ini dapat dikaitkan dengan strategi pembangunan masing-masing negara di kawasan tersebut, yang memilih strategi pembangunan ketiga di atas. Akan tetapi, masalah kemiskinan di negara-negara tersebut tidak terpecahkan. Orientasi pertumbuhan yang dilakukan para pengambil keputusan di kawasan ini, ternyata membuahkan kesenjangan pendapatan. Realitas ini tentu sangat ironis, karena ujung-ujungnya negara-negara industri baru tersebut mengalami masalah yang sama dengan negara-negara industri maju, bahkan lebih buruk. Hal ini dikarenakan struktur sosial-politis yang lebih rumit di negara-negara berkembang. Satu contoh, industrialisasi di negara-negara berkembang seringkali memiliki daya serap tenaga

kerja rendah, sehingga angkatan kerja di negara-negara tersebut tidak memperoleh tempat di dalam arus industrialisasi. Kadangkala, kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja, yang merupakan akar masalah pengangguran di negara berkembang.

KEMISKINAN DAN GLOBALISASI

Fenomena globalisasi sedikit-banyak juga memberikan pengaruh langsung terhadap kemiskinan di Dunia Ketiga. Globalisasi membawa perubahan dalam struktur hubungan ekonomi dan politik antar negara. Istilah "Dunia Tanpa Batas" menjadi sangat populer untuk menggambarkan perubahan ini. Gejala utama dari globalisasi adalah semakin kuatnya ketergantungan antar negara di dunia, sehingga tidak ada satu negara pun yang bebas dari pengaruh negara lain. Dalam konteks pemberantasan kemiskinan, globalisasi bisa memberikan solusi tetapi juga bisa memperburuk situasi. Bagi negara-negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi (SDA, SDM dan Teknologi) kuat, seperti beberapa negara Asia Timur, Asia Tenggara dan Amerika Latin, globalisasi akan meningkatkan ekspor mereka sehingga defisit neraca pembayaran dapat diatasi dan pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Bagaimanapun pertumbuhan ekonomi akan membawa dampak positif bagi pemberantasan kemiskinan. Akan tetapi situasi bisa menjadi lebih buruk bagi negara-negara miskin absolut, seperti beberapa negara Sub-Sahara di Afrika. Mereka hanya mengandalkan ekspor produk primer yang nilai tukarnya semakin turun (UNCTAD,1997). Globalisasi akan memberikan pengaruh positif bagi negara-negara yang berada pada garis kemiskinan atau sedikit di atasnya, namun berpengaruh negatif bagi negara-negara miskin absolut.

Globalisasi memiliki "anak kandung" perdagangan bebas yang menganggap bahwa sistem perdagangan internasional harus lebih terbuka dan tanpa *barrier*. Anggapan ini berdasarkan teori klasik perdagangan internasional, bahwa tanpa proteksi, maka para produsen dapat meningkatkan produktivitasnya untuk menuju kemakmuran (Soetrisno,1997,h 69). Perdagangan bebas berimplikasi dibentuknya GATT (General Agreement on Trade and Tariff) dan WTO (World Trade Organization). Meskipun banyak negara berkembang merasa diuntungkan dengan adanya dua badan tersebut, penderitaan negara-negara *underdeveloped* atau miskin absolut semakin bertambah. Sebab

dengan meratifikasi perjanjian perdagangan bebas, industri lokal negara berkembang dipaksa untuk berkompetisi dengan industri negara maju. Padahal, sebagian besar industri negara berkembang masih berupa *infant industry* yang masih membutuhkan proteksi dalam pengembangannya, sementara industri negara maju sudah merupakan industri mapan dan berteknologi tinggi. Satu contoh, kasus “Krisis Harga Produk Pertanian” yang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, menyebabkan turunnya pendapatan petani Indonesia. Hal ini sebagai akibat terlalu gegabah pemerintah untuk menyerahkan sepenuhnya mekanisme harga produk pertanian kepada pasar. Petani Indonesia dengan paradigma tradisional harus bersaing dengan *High-tech Farming* ala Amerika. Jelas posisi petani Indonesia semakin tersudut dan tentu kontradiktif dengan usaha pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

ASIMETRI EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Hegemoni politik dan ekonomi negara-negara maju (AS dan Eropa) sangat menentukan struktur perdagangan internasional. Namun, negara-negara maju memiliki motif-motif tertentu dalam menancapkan pengaruhnya di dunia. Motif-motif tersebut dapat di bagi menjadi dua, yaitu motif politik dan ekonomi. Motif politik direpresentasikan dengan ekspor ideologi kapitalisme, sedangkan motif ekonomi diwujudkan dengan perluasan pengaruh melalui MNC (Multi National Company). Dalam perkembangannya, motif ekonomi lebih mendominasi hegemoni negara maju terhadap negara berkembang. Satu contoh, laporan Kongres Amerika Serikat tentang program kerjasama militer dengan beberapa negara Amerika Latin, pada tahun 1970 yang menyebutkan bahwa semua kerjasama militer yang dilakukan bertujuan untuk melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional milik AS di negara-negara tersebut (Rojas,R,1997,h. 1).

Edward Weisband (1989) mengemukakan; asimetri ekonomi politik internasional dimulai dari fakta-fakta sejarah berikut :

- Kebangkitan negara-negara industri kapitalis. Negara-negara tersebut merupakan masyarakat mapan di dunia, yaitu : Amerika Utara, Eropa, Australia dan Jepang.

- Kolonisasi para imperialis terhadap wilayah-wilayah dunia ketiga, seperti Afrika, Asia, Amerika Latin, Amerika Tengah dan wilayah Karibia.
- Ketertinggalan dunia ketiga tidak hanya dari aspek geografis, sosioekonomis ataupun politis, namun kombinasi dari ketiganya.

Ketiga hal di atas merupakan "*the mother of all causes*" dari kemiskinan di dunia ketiga dari kacamata historis.

Menurut ekonom Stephen Hymer, asimetri struktur ekonomi politik internasional disebabkan oleh pola hubungan negara maju-berkembang yang membagi negara-negara di dunia menjadi dua kelompok besar, yaitu **metropol** dan **periferi** (A.Isaak,1995,h 215). Metropol adalah pusat-pusat pengambilan keputusan ekonomi-politik dunia (Negara-negara maju), di mana hampir semua keputusan menyangkut nasib negara-negara berkembang justru ditentukan di sana. Sedangkan periferi adalah negara berkembang, yang hanya menerima nasibnya, tanpa akses langsung terhadap proses pengambilan keputusan tersebut.

Asimetri struktur ekonomi politik dunia lebih jelas terlihat dari dominasi negara dunia pertama dan kedua di dalam perdagangan internasional yang mencapai 60%, sedangkan porsi negara-negara dunia ketiga hanya 5%. Ekspor negara-negara dunia ketiga sebagian besar berupa komoditi primer dan hanya terserap sebesar 8,5% di pasar negara maju (Potter dan Sheppard,1998,h.384). Negara-negara berkembang sendiri harus mengimpor barang-barang produksi dan konsumsi berteknologi tinggi, tentu saja terjadi kesenjangan nilai tukar yang cukup besar dalam proses ekspor-impor tersebut. Hal ini mengakibatkan defisit neraca perdagangan yang cukup besar di negara-negara berkembang.

Kesenjangan pendapatan merupakan ekses lain dari asimetri ekonomi politik internasional. Disparitas pendapatan antara negara maju-berkembang hampir tiga sampai lima kali lipat, hal ini dapat dilihat dari *Gross National Product* negara-negara maju dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Kesenjangan pendapatan juga terjadi di dalam negara-negara dunia ketiga. Realitas ini mempengaruhi pola konsumsi mereka. Menurut Michael P. Todaro, permintaan produk konsumsi dengan teknologi tinggi (TV, Stereo dan komponen elektronik) di negara berkembang ditentukan oleh kelas menengah

yang memiliki pendapatan tinggi, namun minoritas. Apabila kesenjangan pendapatan tersebut dapat dikurangi, maka pola konsumsi negara berkembang dapat mengarah menuju produksi kebutuhan dasar dan hal-hal penting lainnya, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Todaro, 1989, h 53).

INTERAKSI NEGARA MAJU-BERKEMBANG

Kemiskinan di negara-negara dunia ketiga tidak dapat dilepaskan dari pola hubungan negara maju-berkembang. Hubungan negara maju-berkembang ternyata jauh dari prinsip kesetaraan, sehingga menempatkan negara berkembang sebagai pihak yang tersudut. Dalam tulisan ini akan dikemukakan tiga teori utama dalam menganalisis pola hubungan negara maju-berkembang. Pertama, teori Centre-Periphery yang dikemukakan oleh John Friedman, kedua, teori Neo Marxis dan Ketergantungan dan ketiga, teori Marxis Klasik.

Teori Centre-Periphery (Pusat-Pinggiran)

Teori ini dikemukakan oleh John Friedman pada tahun 1966, model ini terdiri dari empat tahapan evolusi dari negara dunia ketiga yang *underdeveloped* dan baru merdeka sampai pada sistem perkotaan dan wilayah terintegrasi sepenuhnya di negara-negara maju (Gilbert & Gugler, 1996, h 30-34). Tahap pertama, memahami wilayah yang belum tereksploitir dan dihuni oleh kekuasaan kolonial dalam bentuk desa-desa terpencar. Wilayah-wilayah tersebut berkembang menjadi perkotaan yang pada umumnya makmur, namun sistem perkotaannya terdiri dari sentra-sentra wilayah.

Tahap kedua, mulai munculnya industrialisasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang di anggap produktif, sehingga menimbulkan disparitas pendapatan antar wilayah. Pada tahap ini, muncul struktur spasial yang bersifat dualistik, yaitu, "pusat" dengan pembangunannya yang cepat dan intensif dan "pinggiran" yang stagnan bahkan mengalami kemerosotan. Tahap ketiga, kematangan industri dan kebangkitan politik mulai timbul sebagai reaksi adanya kesenjangan kesejahteraan pusat-pinggiran. Timbulnya kesadaran semacam ini di respons positif oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi disparitas tersebut.

Tahap keempat, ditandai dengan terwujudnya suatu sistem ekonomi spasial yang terintegrasi penuh. Friedman mengkombinasikan integrasi nasional, efisiensi lokasi perusahaan-perusahaan individu, maksimalisasi potensi pertumbuhan yang berkesinambungan dan minimalisasi ketidakseimbangan antar wilayah (Gilbert & Gugler, 1996, h.31). Namun model ini penuh dengan kelemahan, kritik yang dikemukakan Gilbert dan Gugler terhadap model ini adalah, pertama, model ini tidak sesuai dengan kondisi di sebagian besar negara dunia ketiga, terutama di kawasan Asia di mana para kolonialis berhadapan langsung dengan wilayah-wilayah yang padat penduduknya dan proses kolonisasi tersebut selalu memunculkan konflik. Kedua, kurangnya penekanan terhadap pengaruh luar negeri. Padahal, keputusan-keputusan politik di negara-negara berkembang tidak pernah lepas dari pengaruh luar negeri, baik itu pemerintah negara-negara maju ataupun perusahaan-perusahaan multinasional.

Ketiga, teori ini mengesampingkan faktor politik. Asumsi yang mendasari teori ini adalah setiap proses pengambilan keputusan di negara berkembang merupakan kepentingan masyarakat banyak. Pada kenyataannya, banyak sekali keputusan-keputusan pembangunan di negara berkembang hanya berdasarkan keinginan rezim berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Keempat, kemiskinan dalam model ini diperlakukan sebagai masalah regional daripada sebagai fenomena sosial. Menurut Friedman untuk mengeliminir kemiskinan, perlu dibuat kebijakan regional yang bertujuan memberdayakan wilayah-wilayah miskin, dan pada akhirnya akan mengurangi disparitas kesejahteraan antara "pusat" dan "pinggiran". Tetapi, tetap saja timbul kantong-kantong kemiskinan, meskipun wilayah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Teori Neo-Marxis dan Ketergantungan

Teori ini memfokuskan analisisnya pada situasi di negara-negara dunia ketiga, di mana negara-negara miskin menggantungkan hidupnya kepada negara-negara kaya (Kubalkova & Cruickshank, 1989, h 140). Teori ini juga sering disebut *Third World Centrist* atau *Global Theories*. Menurut Kubalkova dan Cruickshank ada beberapa poin penting dalam pola interaksi negara maju berkembang dari perspektif teori ini, yaitu:

1. Rakyat miskin di negara-negara “pinggiran” menderita dua jenis eksploitasi. Pertama, eksploitasi dari pola hubungan antar negara “pusat” (negara-negara metropolis, inti, kapitalis, imperialis dan maju) dengan negara “pinggiran” (negara-negara satelit, selatan, non-komunis, berkembang, Dunia Ketiga) dalam bentuk: intervensi politik dan penanaman modal langsung. Kedua, eksploitasi dari pola hubungan pusat-pinggiran yang terjadi di dalam negara-negara pinggiran. Struktur politik yang kurang demokratis menyebabkan rezim-rezim penguasa di negara-negara berkembang lebih berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari negara-negara “pusat” dalam mengeksploitir rakyatnya sendiri.
2. Negara berfungsi sebagai pelindung hubungan antara perusahaan-perusahaan multinasional dan para elite politik.
3. Golongan kaya di negara-negara pusat dan pinggiran cenderung membentuk aliansi dan menganggap masyarakat miskin sebagai lawan.
4. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara pinggiran berhubungan dengan pola permintaan di negara-negara pusat, sehingga proses pembangunan sektor-sektor modern di negara-negara miskin terpisah dengan sektor tradisional, terutama pertanian.
5. Terbentuknya kelas sosial “pekerja kerah putih” di negara pusat ataupun pinggiran ternyata berhubungan dengan pola produksi perusahaan multinasional yang kapitalis. Hal ini menyebabkan tersingkirnya kelas pekerja lain.
6. Setinggi apapun pertumbuhan ekonomi suatu negara ternyata tidak mengurangi disparitas kesejahteraan antara negara pusat dan pinggiran.

Teori Marxis Klasik

Teori ini berdasarkan pemikiran bahwa asimetri hubungan negara maju-berkembang disebabkan oleh ketergantungan negara kaya terhadap negara miskin demi terus berlangsungnya kapitalisme (loc.cit). Model ini sering disebut teori *Eurocentrist*, karena menganggap bahwa strategi pembangunan di negara Dunia Ketiga pada umumnya lebih menekankan pada penanaman modal asing dan industrialisasi (Hettne, 1992 seperti yang dikutip Hartono, 2000, h.72). Beberapa poin penting dalam teori ini adalah sebagai berikut :

1. Pola hubungan negara maju-berkembang yang selalu mengalami disparitas, dimulai dari imperialisme negara-negara Eropa terhadap negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin pada abad sembilan belas dan terus berlanjut hingga saat ini. Realitas ini sering disebut oleh para pendukung teori ini sebagai “Agresivitas Perilaku” negara-negara Barat.
2. Adanya kontradiksi internal dalam pola produksi di negara-negara miskin.
3. Terjadi disposisi surplus ekspor kapital.
4. Cenderung memiliki anggapan optimis terhadap pola interaksi negara maju-berkembang.

PERUSAHAAN MULTINASIONAL DAN KEMISKINAN DI DUNIA KETIGA

Perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai kontribusi besar dalam perubahan struktur ekonomi internasional saat ini. Mereka ditengarai lebih berperan dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi di negara-negara maju. Perkembangan selanjutnya, kebijakan luar negeri negara-negara maju lebih berdasarkan kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Pembentukan OPIC (*Overseas Private Investment Corporation*) oleh pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk melindungi perusahaan-perusahaan multinasional sebagai “*engine of growth*” bagi negara tersebut adalah bukti dari pernyataan di atas (Rojas, 1997, h 1).

Tingginya angka pengangguran adalah salah satu penyebab kemiskinan di negara Dunia Ketiga. Oleh pemerintah, masalah ini diatasi dengan mengundang sebanyak mungkin penanaman modal langsung ke dalam negara mereka. Pola industrialisasi di negara maju sudah mencapai tahap kedewasaan, sehingga konsentrasi daya saing mereka adalah penguasaan teknologi. Oleh karena itu mereka berusaha memindahkan proses manufaktur ke negara-negara berkembang dengan upah buruh yang rendah. Realitas ini bagaikan gayung bersambut bagi negara-negara berkembang, karena mereka membutuhkan lapangan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran. Namun, pada kenyataannya kontribusi perusahaan-perusahaan multinasional terhadap penyerapan angkatan kerja di negara berkembang hanya berkisar 0,5 – 3,3%, kecuali di Singapura dan Botswana yang mencapai 15 dan 7%. Menyikapi permasalahan ini,

para pengambil keputusan di negara-negara berkembang mengubah orientasi industri mereka, dari *import substitution* menjadi industri yang meminimalisir bahan baku import. Beberapa negara berkembang seperti Korea Utara, Fiji dan beberapa negara Pasifik sudah mencoba melakukan kebijakan ini, namun mengalami kegagalan karena minimnya penguasaan teknologi (Zulkieflimansyah, 2000, h 45).

Menurut Cox (1989), ekspansi perusahaan multinasional di negara-negara berkembang menciptakan tiga kelas pekerja yang berbeda. Pertama, kelas pekerja "White Collar" yang terdidik dan memiliki daya serap terhadap teknologi baru cukup tinggi. Kelas pekerja ini pada umumnya terkonsentrasi di kota-kota inti (negara pusat) dan mereka memiliki jaminan kesejahteraan serta masa depan yang baik. Kelas pekerja ini umumnya bergerak di sektor jasa dan memiliki tanggung jawab manajemen. Kedua, kelas pekerja "lapis kedua", yaitu kelas pekerja yang sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan mempunyai tantangan pekerjaan yang kurang menarik. Mereka adalah para pekerja terdidik di negara-negara berkembang, meskipun untuk ukuran negara Dunia Ketiga kelas pekerja ini memiliki kesejahteraan yang lebih baik, namun nasib mereka tergantung "belas kasihan" pengusaha-pengusaha multinasional negara maju. Ketiga, kelas pekerja marginal, yaitu para pekerja tak terdidik di negara-negara Dunia Ketiga yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan jaminan masa depan yang tak pasti. Kelas pekerja ketiga ini nota bene adalah masyarakat miskin serta para pekerja sektor informal. Di negara-negara berkembang, kelas pekerja ini adalah bagian terbesar dari keseluruhan angkatan kerja.

Pemindahan lokasi manufakturing perusahaan multinasional ke negara-negara berkembang di satu sisi memang menolong negara-negara tersebut dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bagaimanapun pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih kondusif bagi program-program pengentasan kemiskinan. Tetapi, situasi yang kontradiktif justru terjadi di negara maju, kesempatan kerja menjadi berkurang dikarenakan proses tersebut. Di Perancis misalnya, selama dua puluh tahun terakhir pertumbuhan GDP mencapai 80 persen, namun, angka pengangguran meningkat dari 420.000 menjadi 5,1 juta orang (Goldsmith, 1995, h 8). Proses transfer manufakturing dari negara maju menuju negara berkembang justru menciptakan pengangguran di negara-negara maju.

MEWUJUDKAN EGALITARIANISME GLOBAL

Setiap negara mempunyai cita-cita untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Keinginan mulia itu bagi negara maju tidak menjadi masalah, karena keunggulan sumber daya dan kedudukan mereka di dalam tata ekonomi-politik dunia. Namun, bagi negara berkembang situasi menjadi sulit karena keterbatasan internal dan kedudukan mereka yang lemah dalam struktur ekonomi-ekonomi-politik internasional. Kondisi ini memerlukan perubahan yang riil demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan dunia. Berlaluinya era kolonialisme yang dilakukan satu negara terhadap negara lain tidak boleh digantikan dengan penindasan suatu negara oleh kepentingan perusahaan multinasional (*New Form Imperialism*). Penegakan prinsip pemerataan kesejahteraan dunia harus dilakukan.

Dalam konteks hubungan internasional, ada beberapa prinsip yang harus dihormati masing-masing negara. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kemerdekaan dan keadilan, hak untuk mempertahankan diri, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menghormati setiap perjanjian internasional yang telah disepakati dan menjunjung tinggi perdamaian (Nardin, 1989, h 207). Pada kondisi riil negara-negara maju banyak melanggar prinsip-prinsip hubungan internasional tersebut. Negara Dunia Ketiga banyak menjadi korban keserakahan mereka. Pada saat ini negara-negara Dunia Ketiga berkeinginan memperjuangkan haknya dalam mengelola sumber daya alam mereka (Smith, 1989, h 213). Sebuah hal yang ironis mengingat sumber daya alam tersebut berada di wilayah mereka sendiri. Ketertinggalan mereka di bidang sains dan teknologi menjadi penyebab keterbatasan mereka untuk mengolah sumber daya alam. Pada akhirnya lingkaran kemiskinan kembali tercipta.

Prinsip egalitarian menekankan pada supremasi moral dalam mewujudkan keadilan di antara individu atau kelompok sosial (Weisband, 1989, h 215). Apabila prinsip ini dipahami sebagai dasar dalam pola hubungan negara maju-berkembang maka akan tercipta situasi yang kondusif dalam memerangi kemiskinan di negara-negara Dunia Ketiga. Dalam mewujudkan egalitarianisme global, negara-negara berkembang perlu memiliki kesamaan visi dalam menentukan langkah. Secara umum, langkah-langkah yang harus dilakukan negara-negara berkembang, adalah:

1. Memperkuat wadah-wadah kerjasama dalam bidang politik dan ekonomi. Pengejawantahannya dilakukan dengan pemberdayaan aliansi-aliansi negara berkembang yang telah ada, misalnya: UNCTAD, Kelompok 77, Kerjasama Selatan-Selatan. Eksistensi aliansi-aliansi tersebut sudah cukup diakui dunia internasional, namun terkadang mereka mengalami kesulitan dalam memperkuat *bargaining position*-nya. Misalnya, dalam Strategi Pengentasan Kemiskinan yang diformulasikan oleh UNCTAD, di situ tertulis : “..... *Debt relief may directly and indirectly be one of the principal elements to help reduce poverty if the freed resources are properly mobilized and channelled for developmental and poverty alleviation purposes.....*” (UNCTAD, *Standing Committee On Poverty Alleviation, Agreed Conclusions*,h 1). Dari kutipan di atas terlihat bahwa pembebasan hutang oleh negara-negara maju memiliki kontribusi penting bagi pemberantasan kemiskinan di negara Dunia Ketiga.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara berkembang. Pendidikan adalah solusi bagi masalah kemiskinan di Dunia Ketiga. Ketertinggalan mereka terhadap akses teknologi lebih disebabkan mutu pendidikan yang sangat rendah. Program pengentasan kemiskinan melalui pertanian terpadu yang dilakukan Bank Dunia pada dekade 60-an sampai dengan 70-an di Sudan, India, Ethiopia, Mexico, Malawi dan Afghanistan, dapat dijadikan contoh betapa pendidikan menjadi variabel yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut. Dalam program itu para petani diarahkan untuk menggunakan teknik pertanian modern (penggunaan bibit unggul, teknik irigasi dan pemasaran modern) dengan menggunakan sumber daya alam yang mereka miliki (Combs & Ahmed,1974,h 141-178).

SIMPULAN

Struktur ekonomi-politik dunia yang kurang kondusif bagi pemberantasan kemiskinan seharusnya tidak menjadi penghalang negara-negara Dunia Ketiga untuk menuju pencerahan. Negara-negara berkembang harus bergerak dengan kekuatannya sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan yang mereka cita-citakan. Asimetri ekonomi-politik dunia dapat diminimalisir, asalkan aliansi antar negara-negara berkembang diperkuat. Potensi-potensi konflik internal

ataupun eksternal negara-negara Dunia Ketiga harus dicari solusinya. Dengan demikian kekuatan tawar-menawar negara-negara berkembang meningkat di mata negara-negara inti.

Perbaikan internal yang harus dilakukan oleh negara-negara maju adalah memperbaiki kualitas pendidikan mereka. Bagaimanapun pendidikan akan menjadi akses politik, ekonomi dan budaya negara-negara Dunia Ketiga. Aksesibilitas terhadap ketiganya berpengaruh dalam mengangkat masyarakat miskin di Dunia Ketiga menuju tingkat hidup yang lebih baik. Selain itu, perkembangan proses demokratisasi di negara-negara Dunia Ketiga harus berkorelasi positif dengan berkurangnya masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Proses demokratisasi juga akan menghilangkan struktur *core-periferi* di dalam negara berkembang, karena struktur tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar bagi timbulnya kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. 2000. *Developing Asia and the Pacific, ADB Publications*, (Online, <http://www.adb.org>).
- Bayo Ala, Andre. 1996. Definisi Kemiskinan. Dalam Andre Bayo Ala (ed), *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. edisi kedua*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Gilbert, James & Gugler, Josef., 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. edisi pertama*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Goldsmith, James. 1996. *Perangkap, edisi pertama*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Hartono, Arief. 2000. Menelusuri Wacana Pembangunan: Mencari Format Pembangunan Khas Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Yogyakarta: FE-UII.
- Isaak, Robert A. 1995. *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Kubalkova & Cruickshank. 1989. *Marxism and Dependency*. Dalam Edward Weisband (ed) *Poverty Amidst Plenty*. New York: Westview Press.
- Nardin, Terry. 1989. *Justice in the International Society of States*. Dalam Edward Weisband (ed) *Poverty Amidst Plenty*. New York: Westview Press.

- Potter, P. & Sheppard, E., 1998. Trading Primary Commodities. Dalam Potter dan Sheppard (eds) *World of Difference*. Guilford: David Black-Schaffer Press.
- Rojas, Robinson. 1997. *Transnational Corporations and Developing Countries*, Robinson Rojas Publications. (Online, <http://www.rojasdatabank.org>).
- Smith, W.H. 1989. Three Levels of Justice: National, International and Global. Dalam Edward Weisband (ed) *Poverty Amidst Plenty*. New York: Westview Press.
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Demokratisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Todaro, Michael P. 1989. *Who Gets How How Much of What ? A Sample Illustration*. Dalam Edward Weisband (ed) *Poverty Amidst Plenty*. New York: Westview Press.
- UNCTAD. 1997. Globalization and Liberalization: Effects of International Economic Relations on Poverty. *UNCTAD Publications*. (Online) (<http://www.unctad.org> tanpa tanggal akses)
- Zulkieflimansyah. 2000. Orientasi Baru Industri Nasional dan Pentingnya Dukungan Kemampuan Teknologi dalam *Usahawan* 25(8).